|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Harian | : | Media Palu | Kasubaud  Sulteng I |
| Hari, tanggal | : | Selasa, 4 November 2014 |
| Keterangan | : |  |
| Entitas | : | Parimo |

Pungli, Diduga Sekolah Pakai Modus Baru

* Tuesday, November 4, 2014, 17:59

S**eakan tidak pernah kehilangan akal, sejumlah sekolah di Kabupaten Buol masih melakukan praktek pungutan liar (Pungli) terhadap siswanya. Pun modus yang digunakan yaitu melalui pengadaan seragam sekolah.**

Sebut saja yang terjadi di SMP 1 Kecamatan Momunu, beberapa siswanya setiap hari tertentu harus menerima hukuman dari pihak sekolah, hanya karena belum memiliki seragam sekolah.

Sutryadi, salah satu orang tua siswa pada sekolah tersebut, mengaku, anaknya sering mendapat hukuman dari pihak sekolah hanya karena tidak memiliki seragam baru.

“ Anak saya dan beberapa temannya sering dihukum karena tidak pakai seragam olahraga dan baju batik. Padahal anak saya masih memiliki seragam yang lama, tapi sekolah menganggap itu pelanggaran dan gurunya memaksa harus diganti,” uangkap Sutryadi,kepada Mediapalu.com.

Ironisnya kata Sutryadi, untuk mendapatkan seragam pihak sekolah sudah menetapkan harga dan tempat pembelian seragam tersebut.

“Anak saya bilang sekolah sudah menetapkan harganya yakni, untuk seragam olahraga Rp. 100 ribu, dan baju batik Rp. 80 ribu per lembarnya,” tutur Sutryadi menceritakan ungkapan anaknya.

Hal senada juga dikeluhkan Irawati, orang tua wali siswa SMK 1 Kecamatan Biau. Ibu rumah tangga ini mengatakan, meski pihak sekolah tidak memaksakan, namun harga dan tempat pembelian seragam sudah ditentukan pihak sekolah di salah satu toko pakaian yang ada didaerah itu.

“ Waktu itu Anak saya diarahkan ke toko Anugerah (salah satu toko pakaian di kompleks pasar Buol) untuk membeli seragam. Harganya, untuk seragam olahraga Rp. 200 ribu dan seragam batik Rp. 150 ribu,” terang Irawati.

Kepala dinas Dikpora kabupaten Buol, Tonang Malongi saat ditemui diruang kerjanya, Senin (4/10) mengaku tidak mengetahui ihwal praktek tersebut.

Menurutnya, prektek seperti itu merupakan tindakan yang bertentangan dengan azas pendidikan terlebih adanya indikasi monopoli.

Untuk itu, kepada wartawan ia berjaji akan menindaklanjuti masalah tersebut secara prosedural. Yakni, memanggil kepala sekolah yang bersangkutan untuk dimintai keterangan, dan bila ditemukan terbukti dirinya akan memberikan sanksi tegas.

“ Saya belum tahu soal itu, nanti saya panggil kepala sekolahnya untuk dimintai keterangan, jika indikasinya kuat, akan kita BAP (Berita Acara Pemeriksaan red). Dan jika terbukti, pastinya akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” tegas Tonang.

Sementara itu, Kepala sekolah SMP 1 kecamatan Momunu, Sumarmin, via telepon genggam, membantah terkait dugaan pungutan liar yang dikeluhkan orang tua siswa.

“ Tidak benar itu, informasinya dari mana itu ?. memang yang ada di pihak ketigakan, tapi hanya kepada siswa yang belum dapat, singkat kepsek yang langsung memutus percakapan. **MEDIAPALU.COM**